

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dasar pemikiran dari teori keagenan merupakan suatu teori yang nantinya dapat membantu dalam memahami *coporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *agent* (manajer) dengan *principal* (investor). Pemilik mengharapkan *return* yang tinggi dari investasi yang ditanamkan sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi, hal tersebut menyebabkan timbul konflik antara manajemen dengan pemilik (Nugraheni dkk, 2015).

Pemilik termotivasi untuk mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dan meningkatkan laba, sedangkan manajer termotivasi untuk memenuhi kepentingan psikologinya (Herlambang dan Darsono, 2015). Kendala yang akan muncul antara *agent* dan *principal* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang didapat antara manajer dan pemilik perusahaan (Bonita dan Raharja, 2014). Manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya lebih mengetahui kondisi perusahaan daripada pemilik. Manajer berkewajiban memberikan laporan keuangan kepada pemilik (pemegang saham), sedangkan pemilik mengharapkan *return* yang tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Ketidakseimbangan penguasaan

informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi.

Menurut Kusumaningtyas (2012) asimetri informasi dapat menyebabkan dua hal, yaitu: (a) *Moral Hazard*, yaitu bagaimana manajer tidak melaksanakan poin-poin yang telah disepakati pada kontrak kerja, (b) *Adverse Selection*, merupakan kondisi dimana pemilik tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan yang benar-benar didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau adanya kelalaian dalam tugas. Praktik manajemen laba dapat terjadi akibat adanya asimetri informasi yang terjadi di dalam perusahaan.

Dalam teori agensi juga akan memicu terjadinya konflik yang dapat memicu biaya agensi (Indriastuti, 2012). Jensen and Meckling (1976) mengidentifikasi biaya keagenan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) *the monitoring expenditure by principal* adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik, (2) *the bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* kepada *agent* akibat monitoring yang dilakukan, (3) *the residual cost* adalah pengorbanan karena berkurangnya kemakmuran *principal* akibat dari terjadinya perbedaan keputusan antara *principal* dan *agent*.

## 2. *Corporate Governance*

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2004) terdapat 5 prinsip dalam *good corporate governance*. Lima prinsip

utama tersebut yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran. Sedangkan mekanisme *corporate governance* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *internal mechanism* dan *external mechanism*.

*Good corporate governance* merupakan pengendalian kepada manajer agar tidak bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri, namun juga harus menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer (Kusumaningtyas, 2013). *Good corporate governance* menjadi isu hangat di negara maju terutama di Amerika dan negara Eropa, dengan terjadinya kasus kebangkrutan *Enron Corporation* di tahun 2001 (Kusumaningtyas, 2013). Skandal akuntansi Enron tersebut menyebabkan pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan regulasi SOX (*Sarbanes Oxley Act*). SOX dipublikasikan pada Juli 2002, kegunaan dari SOX adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), mengembalikan kepercayaan para investor terhadap pasar modal, dan meningkatkan pengawasan terhadap kantor akuntan public (Sulistiawan dkk, 2011).

*Corporate Governance* timbul karena terjadinya kepemilikan dan pengendalian di dalam perusahaan. Pemisahan dan kepemilikan ini menimbulkan masalah keagenan yaitu menimbulkan asimetri informasi. Dalam masalah keagenan ini diperlukan adanya *good corporate governance* untuk menghilangkan masalah tersebut.

Selain itu, *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan, yaitu melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* (SY dan Hidayati, 2012). Disisi lain Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa konsep dari *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelola perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

a. Prinsip *Good Corporate Governance* Perusahaan Perbankan

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance tahun 2004 terdapat 5 prinsip *good corporate governance*, yaitu:

1) Keterbukaan (*transparency*)

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan

GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

## 2) Akuntabilitas (*accountability*)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank juga harus meyakini bahwa semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan memahami peran dalam pelaksanaan GCG. Selain itu bank juga harus memastikan terdapatnya *check and balanced system* dalam pengelolaan bank.

## 3) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Selain itu bank juga harus bertindak sebagai *good coporate citizen* termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

#### 4) Independensi (*independency*)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan bank tidak terpengaruh oleh pihak luar serta bebas dari benturan kepentingan. Bank juga harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### 5) Kewajaran (*fairness*)

Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### 3. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. *Earning Management* atau manajemen laba merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba dilakukan dengan cara manajer memilih kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan (Agustia, 2013). Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada angka laba yang dilakukan dengan cara teknik dan kebijakan akuntansi (Sulistiawan, 2011). Kebebasan manajer dalam menentukan standar

akuntansi dan ketidaktahuan pemilik terhadap informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan itulah yang mendorong perilaku oportunistik manajer, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen laba.

Manajemen laba dapat dikatakan merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh manajer, karena manajer memanfaatkan ketidaktahuan orang lain akan informasi mengenai perusahaan yang sesungguhnya. Manajemen laba merupakan hal yang sulit untuk dihindari, karena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual digunakan karena dianggap lebih rasional dibandingkan dengan dasar kas (Bonita dan Raharja, 2014).

a. Akrual Diskresioner (*Discretionary Accruals*)

Manajemen laba dapat dilakukan dengan dasar akrual. *Jones Model* mengasumsikan bahwa akrual nondiskresioner bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya, hal tersebut menyebabkan perubahan akrual yang terjadi akibat adanya perubahan akrual diskresioner (Sulistiawan, 2011). *Discretionary accrual* merupakan pengakuan akrual laba atau beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen (Kusumaningtyas, 2013). Contoh dari *discretionary accrual* adalah pertimbangan tentang penentuan umur ekonomi aset tetap atau pertimbangan mengenai pemilihan metode depresiasi (Burhanudin dan Hanifah, 2016).

#### 4. Komite Audit

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit, pengertian dari komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keberadaan komite audit di dalam organisasi perusahaan merupakan salah satu persyaratan implementasi *good corporate governance* bagi perusahaan publik (Prabowo, 2014). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya yang terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman maupun kualitas lain yang diperlukan (KNKCG, 2004). Tugas dari komite audit adalah untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, untuk menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Kusumaningtyas, 2013).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Pasal 17, salah satu syarat dari anggota komite audit adalah komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota komite audit juga harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen, hal tersebut perlu dimiliki oleh anggota

komite audit untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam penyusunan laporan keuangan (Machmuddah, 2015)

a. Independensi Komite Audit

Salah satu prinsip dari komite audit adalah independensi komite audit. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak terhantung pada orang lain (Mulyadi, 2009). Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan keuangan. Individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani permasalahan yang terjadi (Prabowo, 2014). Dengan adanya anggota independen pada komite audit juga dapat menambah kepercayaan investor terhadap penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

b. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit merupakan salah satu syarat dari keanggotaan komite audit. Bahwa komite audit harus memiliki paling sedikit 1 anggota komite audit yang memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan (Komite Nasional *Good Corporate Governance*, 2002). Dengan adanya komite audit yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan, maka laporan keuangan yang dibuat lebih berkualitas.

c. Jumlah Pertemuan Komite Audit

Penyelenggaraan rapat komite audit diatur dalam Salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 BAB IV dengan aturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 13: komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
- 2) Pasal 14: rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu perdua jumlah anggota.
- 3) Pasal 15: keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 4) Pasal 16: setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Anggota-anggota komite audit harus menghadiri rapat tersebut termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal, dan audit eksternal (KNKCG, 2002).

Dengan banyaknya jumlah pertemuan yang diadakan dapat meningkatkan kegiatan komite audit dalam mengawasi manajemen, agar tidak hanya mengoptimalkan kepentingannya sendiri (Kusumaningtyas, 2013).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kusumaningtyas (2012) meneliti mengenai pengaruh independensi komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Independensi komite audit merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Kinerja dari komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki independensi dalam sikap dan pendapat. Disisi lain variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*.

Disisi lain Bonita dan Raharja (2014) meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Pada penelitian ini *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pengaruh kualitas audit, dan pengaruh frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian ini memberikan hasil kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Prabowo (2014) meneliti mengenai pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah komite audit terhadap manajemen laba yang meneliti perusahaan manufaktur pada bursa efek Indonesia periode 2010-2012. Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara simultan variabel komisaris independen, independensi komite audit, ukuran, dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba. Sedangkan secara parsial ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Disisi lain variabel komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Kusumaningtyas (2013), penelitian tersebut meneliti mengenai pengaruh kompetensi dan aktivitas komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa keahlian komite audit dan jumlah pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Nabila dan Daljono (2013) meneliti mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan reputasi auditor terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel aktivitas komite audit, ukuran komite audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Disisi lain Rahmawati (2013) meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif

terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan Prastiti dan Meiranto (2013) yang meneliti mengenai Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa Variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel lain, yaitu variabel keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit. Sedangkan karakteristik lainnya (keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Disisi lain Mishra (2016) meneliti mengenai karakteristik komite audit dan manajemen laba: studi kasus di India. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ukuran komite audit, rangkap jabatan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel independensi komite audit, keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Amar (2014) meneliti mengenai pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa variabel independensi komite audit berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel kontrol yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan variabel kontrol ukuran auditor berpengaruh signifikan positif

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Metta Kusumaningtyas (2012)	Pengaruh Independensi Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba.	Independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Disisi lain kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Annastacya Maria Bonita dan H. Raharja (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Praktik Manajemen Laba	Kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
3.	Dwi Metta Karuniasih (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan	Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Disisi lain proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan keberadaan <i>top share</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4.	Afifa Nabila dan Daljono (2013)	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Laba	Variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel aktivitas komite audit, ukuran komite audit, reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Lanjutan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Danuharja Arvin Prabowo (2014)	Pengaruh Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran dan Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba	Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Sedangkan komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI.
6.	Hikmah Is'ada Rahmawati (2013)	Pengaruh <i>Good Coporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba	Pada penelitian ini variabel dewan komisaris independen, komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, namun komite audit independen tidak berpengaruh negatif signifikan. Pada variabel kepemilikan manajerial juga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba.
7.	Omar Jumhani (2017)	Karakteristik Komite Audit dan Manajemen Laba: Studi di Bahrain.	Independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel ukuran komite audit, keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Lanjutan Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Anindyah Prastiti dan Meiranto (2013)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba	Variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel lain, yaitu variabel keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit.
9.	Mamta Mishra (2016)	Karakteristik Komite Audit dan Manajemen Laba: Studi Kasus di India.	Ukuran komite audit, rangkap jabatan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel independensi komite audit, keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
10.	Anis Ben Amar (2014)	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba: Studi di Prancis	Variabel independensi komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel kontrol yaitu <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan variabel kontrol ukuran auditor berpengaruh signifikan positif.

### C. Kerangka Pemikiran

Praktik manajemen laba tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan dan terjadinya asimetri informasi. Dalam teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki motivasinya masing-masing sehingga dapat

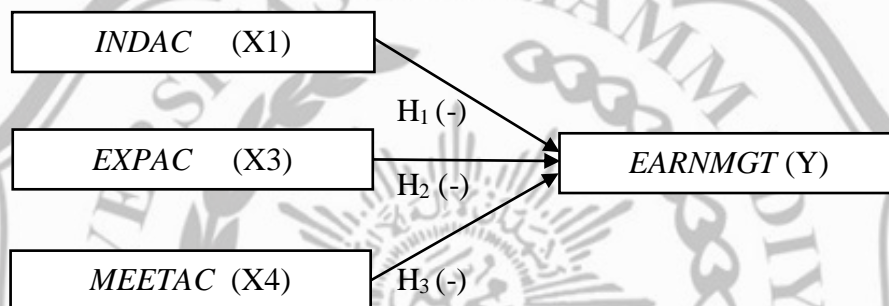
memungkinkan timbulnya konflik kepentingan antara agen dan principal (Nabila dan Daljono, 2013). Masalah keagenan dapat dikurangi dengan mekanisme *corporate governance* (Amin, 2016). Salah satu konsep dari *good corporate governance* adalah dengan membentuk komite audit.

Penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) memberikan hasil bahwa komite audit yang memiliki independensi dalam menyatakan pendapat dan sikap akan membuat kinerja lebih efektif, karena dengan adanya pengawasan yang lebih efektif maka akan membuat praktik manajemen laba menurun. Selain sikap independen, komite audit juga memerlukan keahlian dalam bidang akuntansi maupun keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Penelitian yang dilakukan oleh Soliman dan Ragab (2014) memberikan hasil bahwa komite audit yang memiliki satu anggota yang ahli dalam bidang keuangan dapat menurunkan manipulasi laba pada laporan keuangan.

Tidak hanya sikap independen dan keahlian saja yang dimiliki oleh anggota komite audit, namun anggota komite audit juga memerlukan pertemuan atau rapat. Karena pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan hal yang penting dalam melakukan monitoring manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2013) menunjukkan hasil bahwa aktivitas komite audit yang dilakukan dalam bentuk pertemuan merupakan hal yang penting, karena dengan semakin sering pelaksanaan rapat maka semakin terpantau kegiatan yang ada pada perusahaan. Hal tersebut akan membatasi praktik manajemen laba, karena terdapat pengawasan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian yang telah dijelaskan diatas maka variabel independen dalam penelitian ini adalah Independensi Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Jumlah Pertemuan Komite Audit. Sedangkan variabel dependennya adalah Manajemen Laba. Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

*INDAC* = *Independence Audit Committee/Independensi Komite Audit*

*EXPAC* = *Expertise Audit Committee/Keahlian Komite Audit*

*MEETAC* = *Meeting Audit Committee/Jumlah Pertemuan Komite Audit*

*EARNMGT* = *Earning Management/Manajemen Laba*

## D. Hipotesis

### 1. Independensi Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang tugasnya untuk memonitor laporan keuangan dan kebijakan yang dilakukan

manajemen terhadap perusahaan. Oleh karena itu diperlukan komite audit yang independen, supaya komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Terdapat beberapa penelitian mengenai independensi komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2012), Prastiti dan Meiranto (2013) memperoleh hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari teori keagenan yang berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dengan adanya anggota yang independen dalam bersikap dan berpendapat, maka akan membuat kinerja menjadi efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

## **2. Keahlian Komite Audit**

Keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit dapat mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan tentunya akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang hanya menguntungkan manajemen saja.

Jumhani (2017) dan Kusumaningtyas (2013) meneliti mengenai keahlian komite audit dan memberikan hasil bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut

memberikan hasil bahwa dengan semakin besar proporsi anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi maupun keuangan maka pelaporan keuangan yang dibuat akan lebih berkualitas. Hal tersebut disebabkan dengan adanya anggota yang ahli bidang akuntansi maka akan memudahkan dalam mendeteksi adanya manipulasi laba. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

### 3. Jumlah Pertemuan Komite Audit

Dengan menggunakan teori agensi, dengan banyaknya pertemuan audit yang diadakan dapat mengurangi masalah yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer (Bonita dan Raharja, 2014). Hal itu disebabkan karena komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja para manajer, sehingga dapat mengurangi masalah dalam pelaporan keuangan. Sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian Kusumaningtyas (2013) dan Soliman (2016) memberikan hasil bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas komite audit yang dilakukan dalam bentuk pertemuan merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk melaksanakan *good corporate governance*, dengan semakin sering pelaksanaan rapat maka akan semakin terpantau kegiatan suatu perusahaan (Kusumaningtyas, 2013). Dari penjelasan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

